

# Analisis Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2020



DINAS KOMINFO DAN STATISTIK  
KOTA MAGELANG  
BEKERJA SAMA DENGAN  
MEP FEB UGM

# TIM PENYUSUN

Pengarah	: Ir. H. Sigit Widyonindito, M.T
Wakil Pengarah	: Drs. Joko Budiyono, M.M
Koordinator	: Drs. Suryantoro
Ketua	: Dwi Martani, S.E., M.T
Wakil Ketua	: Wahyu Tri Prasetyo, S.T., M.T
Sekretaris	: Prianta Adi Wibawa, S.T., M. Eng
Tim Peneliti	: Amirullah Setya Hardi, Cand. Oecon, Ph. D Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.SE Dr. Albertus Girik Allo, S.E., M. Si Endiarjati Dewandaru Sadono, S.E., M.Ec. Dev
Redaktur & Layout	: Nur Afiyah Maizunati, S.Si., M.Ec. Dev
Anggota	: Sri Herawati, S.Si., M.M Iwan Triteny Setyadi, S.T., M.T Fardiana, S.P Elisda Arviaty, SS., M. Sc, MAP Budi Imam Hakim, S.E Farikha Dewi, S.P Kurniawan Ardy Saputro, S. Sos Umi Munti'ah, PA, A.Md

Boleh mengutip dengan mencantumkan sumbernya  
Dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Magelang  
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
@2020



Publikasi juga dapat diakses  
secara digital di:

**[datago.magelangkota.go.id](http://datago.magelangkota.go.id)**

Kunjungi portal data terbuka kami untuk akses publikasi statistik sektoral Kota Magelang terkini. Anda juga dapat menyampaikan permohonan data secara daring melalui **Bang Data** dan atau melalui kontak Whatsapp kami di **+62 895-3765-01000**

## TAHUKAH KAMU?

Untuk mendukung kinerja pengendalian harga komoditas dan daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Kominfo dan Statistik memiliki inovasi layanan publik yang dikenal dengan **IndiGO (pantau inflasi melalui DataGO)**

IndiGO merupakan modul yang terintegrasi antara DataGO dengan gawai/telepon genggam seluruh anggota TPID melalui aplikasi Telegram. Kehadiran IndiGO bertujuan untuk menyajikan perkembangan data harga komoditas harian secara realtime yang terintegrasi dan mengirimkan alert atau notifikasi peringatan ke telepon genggam seluruh anggota TPID jika terdapat komoditas dengan harga yang mendekati (85% dari batas koefisien variasi) dan atau melebihi batas koefisien variasi yang ditetapkan. Masyarakat juga dapat memantau harga di tiga pasar besar di Kota Magelang (pasar Kebon Polo, pasar Rejowinangun dan pasar Gotong Royong) setiap hari secara realtime dalam IndiGO ini. Melalui IndiGO, maka early warning system berbasis data dimiliki oleh TPID Kota Magelang sehingga pergerakan harga dapat terpantau dengan rutin dan gejala harga dapat terantisipasi dengan cepat.

Yuk join IndiGO di  
**<https://t.me/komoditasmg1>**

# SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera,  
Shalom,  
Oom Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Berkah Dalem,  
Salam Kebajikan.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas publikasi buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2020. Terlaksananya penelitian ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, yaitu Pemerintah Kota Magelang, Badan Pusat Statistik Kota Magelang dan Universitas Gadjah Mada.

Buku ini menyajikan gambaran kondisi perekonomian makro Kota Magelang dan proyeksi laju inflasi tahun 2020. Keberadaan angka inflasi sebagai salah satu indikator makro mutlak harus tersedia, sehingga Pemerintah Kota Magelang dapat mengukur capaian pembangunan ekonomi berdasarkan parameter yang jelas dan pasti.

Harapan saya dengan dipublikasikannya buku ini dapat dijadikan bahan bagi evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang, serta sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Semoga kedepannya kita dapat menumbuhkan perekonomian di Kota Magelang dengan lebih baik, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan iklim investasi yang kondusif.

Terimakasih kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang serta semua pihak yang telah membantu menyusun dan menerbitkan buku ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Oom Shanti Shanti Shanti Oom.

WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



# PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang Tahun 2020. Laporan ini merupakan hasil akhir dari kajian dan penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur laju inflasi Kota Magelang tahun 2020, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan berbasis data. Pelaksanaan penelitian ini telah diupayakan secara optimal guna memperoleh hasil ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian ini, Pemerintah Kota Magelang menggandeng akademisi dari Universitas Gadjah Mada dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik Kota Magelang, untuk melakukan proyeksi perkembangan laju inflasi Kota Magelang tahun 2020 dengan menggunakan berbagai metode dan dasar keilmuan yang kuat, sehingga diyakini memberikan hasil yang akurat.

Kami berharap dengan tersedianya buku ini dapat dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan data sebagai bahan dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu terbitnya buku ini, semoga kerjasama dan partisipasi yang sudah terjalin dengan baik dapat ditingkatkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK  
KOTA MAGELANG



Drs. SURYANTORO



# DAFTAR ISI

ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

**DAFTAR ISI 6**

**DAFTAR GAMBAR 8**

**DAFTAR TABEL 10**

**EXECUTIVE SUMMARY 11**

**BAB 1 PENDAHULUAN 13**

- 1.1.Latar Belakang 13
- 1.2.Dasar Hukum 14
- 1.3.Tujuan dan Manfaat 14
- 1.4.Ruang Lingkup 15
- 1.5.Sistematika Penulisan 15

**BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 16**

- 2.1.Pengertian Inflasi 16
- 2.2.Metode Penghitungan Inflasi 16
- 2.3.Faktor Penyebab Inflasi 19
- 2.4.Tingkat Keparahan Inflasi 20

**BAB 3 METODE KAJIAN 22**

- 3.1.Metode Pengumpulan Data 22
- 3.2.Metode Analisis 22

**BAB 4 HASIL PENELITIAN 26**

- 4.1.Gambaran Perekonomian Kota Magelang 26
  - 4.1.1. Kinerja Perekonomian 26
  - 4.1.2. Kemiskinan 30
  - 4.1.3. Ketenagakerjaan 31
  - 4.1.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33

# DAFTAR ISI

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

4.2. Gambaran Inflasi Kota Magelang	34
4.2.1. Inflasi Bulanan dan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	34
4.2.2. Perkembangan Harga Beberapa Komoditi Strategis, Pangan, serta Sayur dan Buah-Buahan di Kota Magelang	36
4.3. Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Kota Magelang	42
4.4. Proyeksi Inflasi Kota Magelang Tahun 2020	45
4.4.1. Analisis <i>Time Trend</i>	46
4.4.2. <i>Specific Seasonal Index</i>	47
4.4.3. Deflator PDRB	49
4.4.4. Tipologi Klassen	51
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Rekomendasi	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>59</b>



Implementasi retribusi non-tunai di pasar Kota Magelang

# DAFTAR GAMBAR

ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

- Gambar 2.1 Konkordansi Klasifikasi IHK dan COICOP 2018 **17**
- Gambar 2.2 *Demand Pull* Inflation dan *Cost Push Inflation* **19**
- Gambar 3.1 Pembagian Wilayah berdasarkan Tipologi Klassen **25**
- Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2015-2019 (%) **27**
- Gambar 4.2 Struktur Ekonomi Kota Magelang, 2019 (%) **27**
- Gambar 4.3 Rata-rata Pertumbuhan dan Sumbangan Lapangan Usaha Kota Magelang berdasar PDRB Harga Konstan, 2011-2019 (%) **28**
- Gambar 4.4 PDRB Riil per Kapita Kota Magelang, 2010-2019 (Rp Juta/Tahun) **30**
- Gambar 4.5 Gini Ratio Kota Magelang, 2009-2013 **34**
- Gambar 4.6 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kota Magelang berdasarkan Kriteria Bank Dunia, 2017-2019 (%) **34**
- Gambar 4.7 Rata-Rata Harga Kelompok Barang Strategis, Komoditas Pangan, serta Sayur dan Buah-Buahan di Kota Magelang dari Januari–November 2020 **38**
- Gambar 4.8 Rata-Rata Persentase Kenaikan Harga Kelompok Barang Strategis, Komoditas Pangan, serta Sayur dan Buah-Buahan di Kota Magelang per bulan dari Februari–November 2020 **39**
- Gambar 4.9 Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum di Kota Magelang menurut Kategori Usaha, Agustus 2019–Agustus 2020 (Juta Rp) **44**
- Gambar 4.10 Hasil Observasi Inflasi Kota Magelang (2008–2019) serta Hasil Proyeksi, *Upper* dan *Lower* Tahun 2020 **46**
- Gambar 4.11 *Mean* IHK selama periode 2016–2019 **48**
- Gambar 4.12 Hasil Observasi IHK Kota Magelang (2008–2019) serta Hasil Proyeksi, *Upper* dan *Lower* Tahun 2020 **49**
- Gambar 4.13 Inflasi Kota Magelang dengan Metode IHK vs *Deflator* PDRB **50**

# DAFTAR GAMBAR

ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

- Gambar 4.14 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan IPM **52**
- Gambar 4.15 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan Persentase Penduduk Miskin **52**
- Gambar 4.16 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi **53**
- Gambar 4.17 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan PDRB **53**
- Gambar 4.18 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan PDRB per Kapita **54**
- Gambar 4.19 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan *Share* Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB **54**
- Gambar 4.20 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan *Purchasing Power Parity* (PPP) **55**
- Gambar 4.21 Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan *Share* Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB ADHB **55**

# DAFTAR TABEL

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

- Tabel 3.1 Perbandingan Perhitungan Inflasi dengan IHK dan Deflator PDRB **24**
- Tabel 4.1 Kategorisasi Pertumbuhan dan Sumbangan Lapangan Usaha Kota Magelang, 2011-2019 **29**
- Tabel 4.2 Indikator Kemiskinan Kota Magelang, 2015-2019 **31**
- Tabel 4.3 TPAK dan TPT Kota Magelang, 2014-2019 (%) **32**
- Tabel 4.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Magelang yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2019 **32**
- Tabel 4.5 Tingkat Inflasi Bulanan di Kota Magelang (2012=100), 2015-2019 **35**
- Tabel 4.6 Tingkat Inflasi per tahun menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Magelang (2012=100), 2015-2019 **36**
- Tabel 4.7 Perkembangan Harga Beberapa Komoditi yang Berada pada Kelompok Komoditi Barang Strategis Periode Juli–November 2020 **39**
- Tabel 4.8 Perkembangan Harga Beberapa Komoditi yang Berada pada Kelompok Komoditi Pangan Periode Januari–November 2020 **40**
- Tabel 4.9 Perkembangan Harga Beberapa Komoditi yang Berada pada Kelompok Sayur dan Buah-buahan Periode Januari–November 2020 **42**
- Tabel 4.10 Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum di Kota Magelang menurut Lapangan Usaha, Agustus 2019–Agustus 2020 (Juta Rp) **45**
- Tabel 4.11 Proyeksi Berbagai Lembaga terkait Inflasi Indonesia Tahun 2020 **47**
- Tabel 4.12 Hasil Proyeksi IHK, *Upper* dan *Lower* Tahun 2020 **48**
- Tabel 4.13 Perbandingan dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah **50**
- Tabel 5.1 Perbandingan Nilai Inflasi Kota Magelang dengan Berbagai Model dalam Kondisi Normal (Tanpa Covid-19) **57**

# EXECUTIVE SUMMARY

Pemerintah Kota Magelang telah menghitung dan merilis angka inflasi secara rutin. Penghitungan tingkat inflasi terakhir di Kota Magelang adalah pada tahun 2019, di mana pada periode tersebut inflasi terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2019, tingkat inflasi Kota Magelang mencapai 0,33 persen (2,19 persen *year on year*).

Terkait dengan adanya perubahan kebijakan tahun dasar perhitungan inflasi (2018=100) yang dilakukan oleh BPS, maka sejak Januari 2020 tingkat inflasi hanya dihitung di kabupaten/kota yang menyelenggarakan Survei Biaya Hidup (SBH), dimana untuk Provinsi Jawa Tengah hanya terdapat enam kota penyelenggaraan SBH yaitu Kota Cilacap, Kota Tegal, Kota Purwokerto, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Kudus. Karenanya, BPS Kota Magelang tidak menghitung inflasi untuk tahun 2020.

Hal tersebut menjadi dilema bagi Pemerintah Kota Magelang karena inflasi merupakan indikator kinerja yang telah tertuang dalam RPJMD, sehingga keberadaan angka tersebut mutlak diperlukan. Mengingat saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 dan telah memasuki semester II tahun 2020, maka pengukuran inflasi 2020 tidak dimungkinkan jika melalui penggunaan data primer, sehingga langkah yang paling

efektif adalah menggunakan metode statistika dan teori ekonomi yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan proksi atau proyeksi terhadap inflasi 2020 dengan memperhitungkan berbagai faktor sosio-ekonomi lain yang terjadi sepanjang tahun, khususnya terkait munculnya pandemi Covid-19.

**Metode yang digunakan untuk melakukan proyeksi inflasi Kota Magelang tahun 2020 adalah analisis *time trend* (model univariat), *specific seasonal index*, *deflator* PDRB dan Tipologi Klassen. Untuk mendapatkan metode yang terbaik maka digunakan metode yang memiliki nilai *bond of error on estimation* terkecil.**

Data yang digunakan adalah data makro yang terdiri dari inflasi Kota Magelang, inflasi pada kota SBH di Provinsi Jawa Tengah, PDRB, PDRB per kapita, IPM, persentase penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, *share* sektor industri pengolahan, *purchasing power parity* (PPP) dan *share* pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (*adhb*). Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan Tipologi Klassen merupakan

pendekatan yang perlu mendapat pertimbangan dari Kota Magelang. Kota yang dijadikan acuan (*benchmark city*) dalam pendekatan Tipologi Klassen adalah Kota Tegal, karena kota tersebut memiliki berbagai karakteristik ekonomi makro yang mirip dengan Kota Magelang

**“Nilai hasil estimasi dengan Tipologi Klassen menunjukkan bahwa inflasi Kota Magelang pada tahun 2020 diproyeksi akan berada pada kisaran nilai 2,23–2,85 persen”**

Dari hasil kajian ini dapat dirumuskan beberapa rekomendasi berikut:

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang perlu meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan Kepolisian Resor Kota Magelang terkait pemantauan harga-harga di tingkat produsen maupun konsumen.
2. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Magelang perlu menjamin pertambahan kasus positif Covid-19 terkendali, karena bila kasus Covid-19 terkendali, maka dampak terhadap perekonomian Kota Magelang tidak semakin parah. Hal ini menjadi salah satu prasyarat tercapainya angka proyeksi inflasi, atau setidaknya mendekati capaian angka tersebut



Pedagang Pasar Kebonpolo mulai menggunakan e-retribusi

# 1. PENDAHULUAN

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu elemen penting dari sebuah proses perencanaan pembangunan daerah adalah adanya indikator atau tolok ukur yang bisa menggambarkan kondisi riil perkembangan pembangunan di daerah secara berkala. Beberapa indikator tersebut diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta Indeks Gini. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator makro ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah.

Pengukuran tingkat inflasi yang umum di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK). Pemerintah Kota Magelang telah secara rutin menghitung dan merilis angka inflasi tersebut berdasarkan data sekunder publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Penghitungan tingkat inflasi terakhir di Kota Magelang adalah pada tahun 2019, di mana pada periode tersebut inflasi terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2019, tingkat inflasi Kota Magelang mencapai 0,33 persen (2,19 persen *year on year*).

Terkait dengan adanya perubahan kebijakan tahun dasar perhitungan inflasi (2018=100) yang dilakukan oleh BPS, maka sejak Januari 2020 tingkat inflasi hanya dihitung di kabupaten/kota yang menyelenggarakan Survei Biaya Hidup (SBH). Di Provinsi Jawa Tengah, hanya terdapat enam kota penyelenggaraan SBH yaitu Kota Cilacap, Kota Tegal, Kota Purwokerto, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Kudus. Karenanya, BPS Kota Magelang tidak menghitung tingkat inflasi untuk tahun 2020.

Hal tersebut menjadi dilema bagi Pemerintah Kota Magelang karena tingkat inflasi merupakan indikator kinerja yang telah tertuang dalam RPJMD, sehingga keberadaan angka tersebut mutlak diperlukan. Mengingat saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 dan telah memasuki semester II tahun 2020, maka pengukuran tingkat inflasi 2020 tidak dimungkinkan melalui penggunaan data primer, sehingga langkah yang paling efektif adalah menggunakan metode

statistika dan teori ekonomi yang benar untuk melakukan proksi atau proyeksi terhadap tingkat inflasi 2020 dengan memperhitungkan berbagai faktor sosio-ekonomi lain yang terjadi sepanjang tahun, khususnya terkait munculnya pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang menginisiasi pelaksanaan kegiatan perhitungan proyeksi inflasi 2020 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Output kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat inflasi tahun 2020 yang secara statistik dan teori ekonomi dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi rujukan capaian indikator kinerja RPJMD Kota Magelang.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Analisis Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021; dan
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kegiatan Analisis Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun Anggaran 2020 adalah menyediakan dokumen kajian yang berisi gambaran pergerakan

harga di Kota Magelang dan proyeksi tingkat inflasi tahun 2020. Sementara itu, manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan angka proyeksi tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat dijadikan rujukan capaian indikator kinerja RPJMD Kota Magelang.

#### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan Analisis Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Kajian singkat gambaran sosio-ekonomi Kota Magelang tahun 2020;
2. Kajian singkat pergerakan harga di Kota Magelang; dan
3. Proyeksi tingkat inflasi tahun 2020.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Kajian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang kajian, dasar hukum yang mendasari kajian, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan dari kajian ini.
- Bab 2. Bab ini menjelaskan tentang teori dari inflasi mulai dari pengertian dan jenis inflasi hingga metode perhitungan inflasi yang selama ini digunakan.
- Bab 3. Bab ini menguraikan secara lengkap tentang metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari kajian ini yang meliputi metode pengumpulan data serta analisis data.
- Bab 4. Bab ini menyajikan hasil dari kajian yang telah dilakukan meliputi gambaran umum perekonomian Kota Magelang serta proyeksi inflasi Kota Magelang tahun 2020.
- Bab 5. Bab ini melaporkan kesimpulan dari kajian serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang ditawarkan kepada Pemerintah Kota Magelang.

# 2. KAJIAN PUSTAKA

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

### 2.1. Pengertian Inflasi

Inflasi yang stabil dan terkendali akan menciptakan perekonomian yang stabil. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Sementara itu, deflasi adalah penurunan harga secara umum dan terus-menerus. Secara matematis bentuk formula inflasi adalah:

$$\text{Inflasi/Deflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P adalah harga dan t adalah waktu.

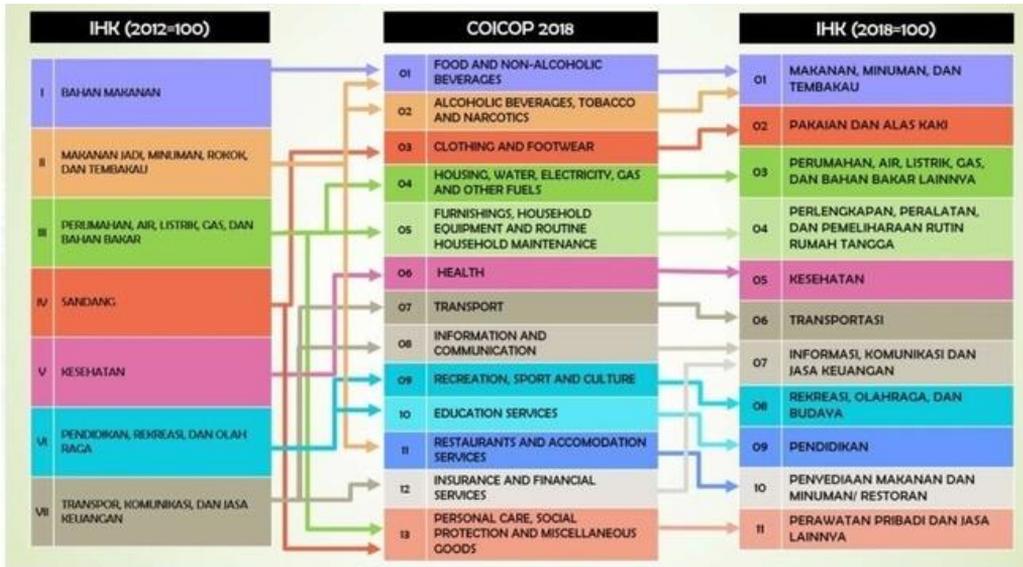
### 2.2. Metode Penghitungan Inflasi

Dasar harga yang dipergunakan dalam perhitungan inflasi adalah indeks harga konsumen (*consumer price index*, CPI), indeks harga produsen (*producer price index*, PPI) atau deflator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks Harga Produsen (IHP) mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Sementara itu, deflator PDRB adalah rasio antara PDRB nominal (atas harga berlaku) dan PDRB riil (atas harga konstan).

Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh BPS. Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada SBH yang dilaksanakan

oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 82 kota merupakan cakupan kota SBH 2012 dan 8 kota merupakan kota baru. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan total sampel rumah tangga sebanyak 141.600 rumah tangga.



**Gambar 2.1** Konkordansi Klasifikasi IHK dan COICOP 2018 (BPS, 2020)

Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018, dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub-kelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), adalah sebagai berikut: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan,

peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (BPS, 2020).

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi (Bank Indonesia, 2020) tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Inflasi inti (*core inflation*), yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
  - a. Interaksi permintaan–penawaran
  - b. Lingkungan eksternal, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
  - c. Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen
2. Inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari:
  - a. Inflasi komponen harga yang bergejolak (*volatile foods*), adalah inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
  - b. Inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*), adalah inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

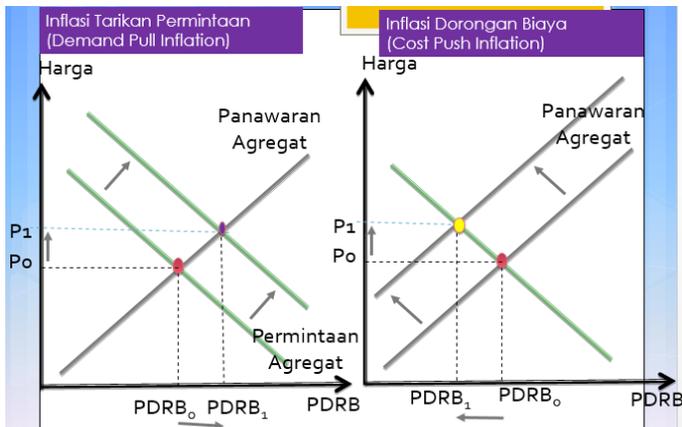
Paket komoditas hasil SBH 2018 berjumlah 835 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta sebanyak 473 barang dan jasa, dan kota dengan jumlah paket komoditas paling sedikit sebanyak 248 komoditas adalah Sintang yang merupakan kota baru. Jumlah paket komoditas komponen inti (*core inflation*) sebanyak 711 komoditas, komponen harga yang diatur pemerintah

(*administered prices*) sebanyak 23 komoditas, dan komponen harga yang bergejolak (*volatile foods*) sebanyak 101 komoditas (BPS, 2020).

### 2.3. Faktor Penyebab Inflasi

Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*. *Demand-pull inflation*, atau inflasi tarikan permintaan, atau dikenal juga dengan sebutan *Philips Curve Inflation* adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa pada saat tertentu. Sedangkan *cost-push inflation*, atau inflasi dorongan penawaran, atau sering disebut dengan *supply shock inflation* adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi.

Bank Indonesia (2020) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *cost push inflation* antara lain: depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Sedangkan *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Secara grafis, perbedaan kedua jenis inflasi ini dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.2 berikut.



**Gambar 2.2** Demand-Pull Inflation dan Cost-Push Inflation  
(Mankiw, 2011)

Pada kasus *demand-pull inflation*, kenaikan harga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Gambar 2.2 ditunjukkan oleh kenaikan  $P_0$  ke  $P_1$  yang menyebabkan permintaan agregat bergeser ke kanan (PDRB naik). Sementara itu, pada kasus *cost-push inflation*, kenaikan harga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Gambar 2.2 ditunjukkan oleh kenaikan  $P_0$  ke  $P_1$  yang menyebabkan permintaan agregat bergeser ke kiri (PDRB turun). Dengan demikian, jika di suatu daerah terjadi inflasi, maka perlu diidentifikasi faktor penyebabnya. Karena berbeda faktor penyebab, maka kebijakan untuk mengatasinya juga berbeda.

#### 2.4. Tingkat Keparahan Inflasi

Inflasi merupakan salah satu prasyarat agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Secara teori, inflasi yang rendah dan stabil merupakan kondisi yang diharapkan oleh semua pihak (pemerintah, dunia usaha, investor, pekerja, dan rumah tangga/individu). Kondisi inflasi yang rendah dan stabil akan menggerakkan perekonomian yang lebih baik dibandingkan kondisi inflasi yang lainnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bank Indonesia (2020) bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak pada perekonomian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, melalui:

- a. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil (pendapatan yang siap dibelanjakan/*disposable income*) dari masyarakat akan turun sehingga derajat kesejahteraan mereka akan turun. Implikasi lainnya adalah garis kemiskinan akan meningkat sehingga orang yang rentan miskin akan jatuh dalam kemiskinan dan mereka yang miskin akan semakin miskin.
- b. Inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam perekonomian. Ketidakpastian ini menyebabkan pelaku ekonomi menjadi ragu dalam mengambil keputusan investasi, konsumsi, dan produksi. Implikasinya, roda perekonomian akan menjadi melambat dan pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat pula.

- c. Inflasi yang tinggi dalam negeri dibandingkan dengan inflasi negara tetangga akan menyebabkan tingkat bunga domestik akan meningkat dibandingkan dengan negara tetangga. Implikasinya, tekanan terhadap nilai rupiah semakin tinggi dan adanya *capital outflow*.

Menurut Suseno dan Astiyah (2009), tingkat keparahan inflasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Inflasi sangat berat (*hyperinflation*), jika inflasi berada diatas 100 persen.
- b. Inflasi berat (*high inflation*), jika inflasi berkisar antara 30 – 100 persen.
- c. Inflasi sedang (*galloping inflation*), jika inflasi berkisar antara 10 – 30 persen.
- d. Inflasi ringan (*creeping inflation*), jika inflasi berada di bawah 10 persen.



Geliat pedagang di pasar Rejowinangun Kota Magelang

# 3. METODE KAJIAN

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

### 3.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan metode *desk study*, metode ini digunakan untuk melakukan pemetaan awal terkait sumber data dan metode proyeksi yang akan digunakan dalam kajian ini. Selain itu, pemetaan juga dilakukan terhadap berbagai kondisi perekonomian yang terjadi di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan dunia secara umum. Kajian ini menggunakan beberapa data sekunder di antaranya adalah:

- a. Statistik ekonomi dan sosial Kota Magelang, diantaranya PDRB, tingkat inflasi, dan jumlah penduduk.
- b. RPJMD Kota Magelang
- c. Inflasi beberapa kota/kabupaten rujukan di Provinsi Jawa Tengah.

### 3.2. Metode Analisis

Data yang telah diperoleh dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif kemudian diolah dengan menggunakan beberapa metode, antara lain pemetaan masalah, statistik deskriptif, dan metode proyeksi.

- a. **Pemetaan masalah.** Metode ini digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap masalah dari data dan metode yang digunakan dalam memproyeksi inflasi tahun 2020 di Kota Magelang.
- b. **Statistik deskriptif.** Metode ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah diperoleh agar dapat dibaca dan dianalisis dengan mudah. Metode ini dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan data. Data yang terkumpul juga akan dianalisis menggunakan metode grafik. Analisis grafik dapat digunakan untuk melihat perkembangan variabel antar waktu.
- c. **Metode proyeksi.** Metode ini digunakan untuk melakukan proyeksi terhadap inflasi tahun 2020 di Kota Magelang. Secara umum, metode yang digunakan, antara lain:
  - Analisis *Time Trend* (Model Univariat)

Analisis sederhana yang sering digunakan untuk melakukan proyeksi suatu nilai pada masa yang akan datang adalah analisis *time trend*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *least square*.

$$\begin{aligned}\hat{Y}_i &= a + bt_i \\ a &= \bar{Y}_i - b\bar{t}_i \\ b &= \frac{\sum(t_i - \bar{t}_i)(Y_i - \bar{Y}_i)}{\sum(t_i - \bar{t}_i)^2}\end{aligned}$$

Di mana:

$\hat{Y}_i$  = besarnya inflasi ke-i

$\bar{Y}_i$  = rata-rata besarnya inflasi ke-i

$t_i$  = tahun ke-i (*time trend*)

$\bar{t}_i$  = rata-rata tahun ke-i

$a$  = konstanta

$b$  = koefisien

- *Specific Seasonal Index*

*Seasonal index* adalah pengukuran perkiraan yang mempertimbangkan siklus dari IHK Kota Magelang. Pendekatan ini menjadi penting karena IHK Kota Magelang menunjukkan pola yang jelas antar waktu. Dengan memperoleh nilai IHK maka kita akan memperoleh inflasi Kota Magelang.

- Deflator PDRB

Deflator PDRB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Deflator PDRB dihasilkan dengan membagi PDRB atas dasar harga nominal dengan PDRB atas dasar harga konstan.

$$\text{Deflator PDB} = \frac{\text{PDB nominal (harga berlaku)}}{\text{PDB riil (harga konstan)}} \times 100$$

**Tabel 3.1** Perbandingan Perhitungan Inflasi dengan IHK dan Deflator PDRB

IHK	Deflator PDB
Mengukur perubahan harga untuk komoditas tertentu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hingga 2019 → 225-462 komoditi</li> <li>• Mulai Januari 2020 → 248-473 komoditi</li> </ul>	Mengukur rata-rata perubahan harga untuk seluruh barang/jasa yang diperdagangkan dalam suatu wilayah.
Komoditi yang diukur setiap tahun adalah sama	Barang/jasa yang diperdagangkan dalam suatu wilayah dapat berubah-ubah setiap tahunnya.
Konsumsi hanya sektor rumah tangga	Konsumsi pada sektor rumah tangga, pemerintah, dan usaha.
Harga komoditas meliputi barang impor	Harga semua barang yang diproduksi dalam negeri

- **Tipologi Klassen**

Analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) biasanya digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Secara umum, Tipologi Klassen menggunakan dua variabel yaitu variabel pertumbuhan ekonomi (sumbu vertikal) dan PDRB per kapita (sumbu horizontal). Analisis ini kemudian akan menghasilkan empat kuadran seperti pada Gambar 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi	<b>Kuadran III</b> Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat	<b>Kuadran IV</b> Daerah maju dan tumbuh dengan pesat
	<b>Kuadran I</b> Daerah relatif tertinggal	<b>Kuadran II</b> Daerah maju tetapi tertekan
<b>PDRB per Kapita</b>		

Gambar 3.1 Pembagian Wilayah berdasarkan Tipologi Klassen (Arsyad, 2016)

Analisis ini digunakan sebagai pendekatan untuk mencari kota SBH acuan bagi Kota Magelang. Variabel pada sumbu horizontal yang digunakan adalah inflasi, sedangkan pada sumbu vertikal menggunakan beberapa variabel sosial dan ekonomi (IPM, persentase penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, *share* sektor industri terhadap PDRB).



Pemantauan harga di pasar oleh Wali Kota dan Gubernur

# 4. HASIL PENELITIAN

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

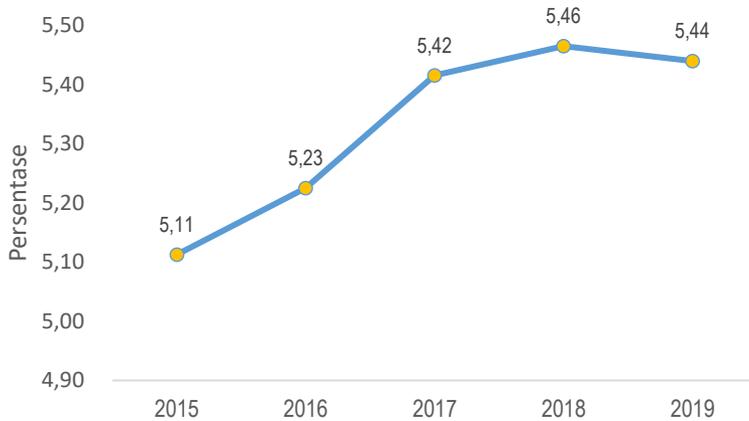
### 4.1. Gambaran Perekonomian Kota Magelang

Secara astronomis, Kota Magelang terletak pada  $110^{\circ}12'30''$  sampai  $110^{\circ}12'52''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}26'28''$  sampai  $7^{\circ}30'9''$  Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Magelang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang. Dengan demikian, wilayah Kota Magelang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Magelang, di mana sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Secang, sisi timur dengan Kecamatan Tegalrejo, sisi selatan dengan Kecamatan Mertoyudan dan sisi barat dengan Kecamatan Bandongan. Sementara itu, secara administratif Kota Magelang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Magelang Selatan, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Utara.

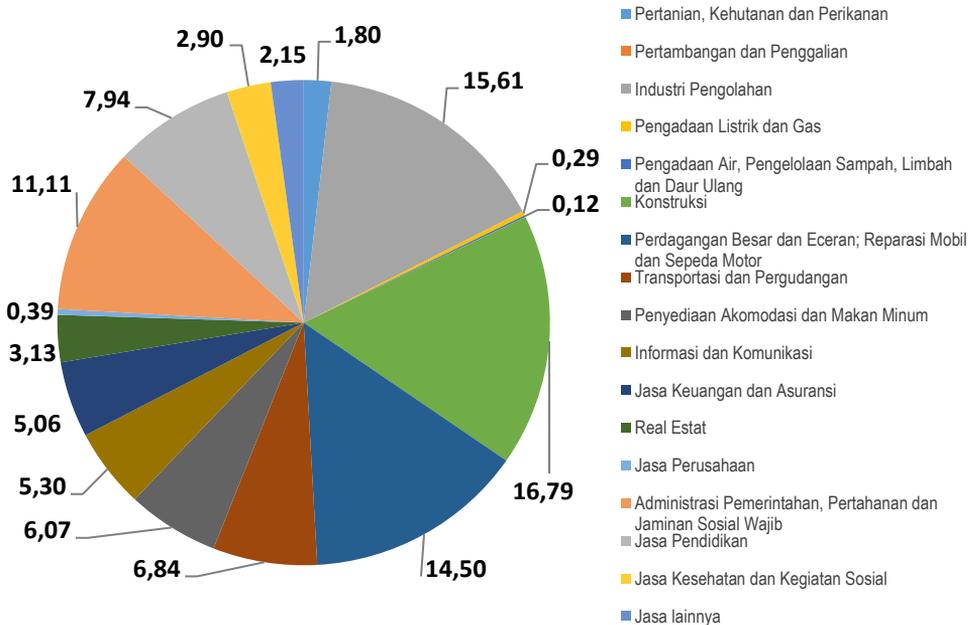
Secara historis morfologis, Kota Magelang merupakan kota berbentuk linier dengan kecenderungan arah utara-selatan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya jalur transportasi yang menghubungkan Yogyakarta dan Semarang. Jalur arteri primer yang menghubungkan kedua kota utama di bagian tengah Pulau Jawa tersebut, seakan-akan membelah Kota Magelang menjadi dua bagian yaitu sisi Barat dan Timur yang hampir sama. Filosofi Kota Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga bermakna bahwa Kota Magelang adalah *Tuin Van Java* (Kota Kebun/Tamannya Pulau Jawa).

#### 4.1.1. Kinerja Perekonomian

Ditinjau dari segi kinerja perekonomian, maka pertumbuhan ekonomi Kota Magelang cenderung meningkat dan stabil di atas 5 persen selama periode 2015-2019 (lihat Gambar 4.1). Pada tahun 2015, perekonomian Kota Magelang tumbuh sebesar 5,11 persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 angkanya naik menjadi 5,44 persen. Sementara itu, dari segi struktur ekonomi, perekonomian Kota Magelang pada tahun 2019 didominasi oleh sektor konstruksi (17 persen), industri pengolahan (16 persen) serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (14 persen).



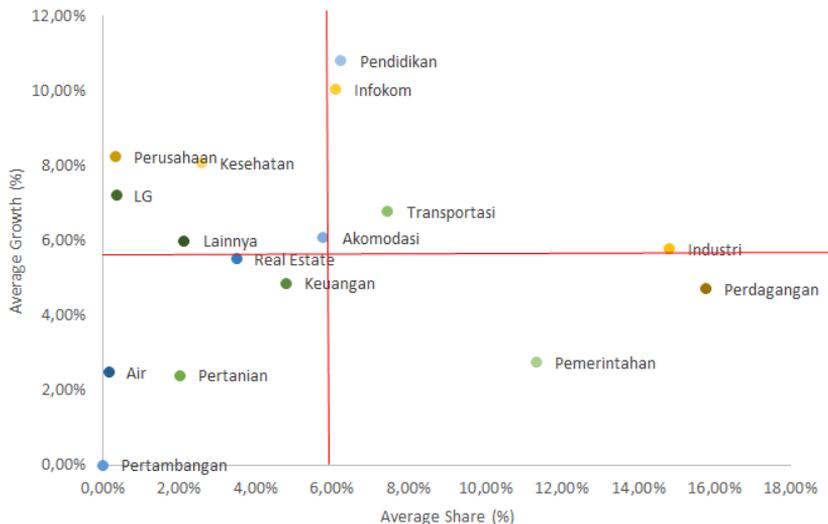
**Gambar 4.1** Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2015-2019 (%)  
 Sumber: BPS Kota Magelang (2020)



**Gambar 4.2** Struktur Ekonomi Kota Magelang, 2019 (%)  
 Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

Jika rata-rata pertumbuhan dan sumbangan lapangan usaha pembentuk PDRB tersebut dibuat kategorisasi seperti Tipologi Klasen, maka hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.1 berikut. Hasilnya adalah empat kelompok lapangan usaha, yaitu: (1) kelompok dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan *share* PDRB rendah; (2) kelompok dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan *share* PDRB tinggi; (3) kelompok dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan *share* PDRB rendah; dan (4) kelompok dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan *share* PDRB tinggi. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi posisi dan arah pembangunan suatu daerah.

Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan dan *share* yang tinggi selama periode 2011-2019 adalah: (1) industri pengolahan; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan komunikasi; dan (4) jasa pendidikan. Empat yang dominan ini menggambarkan bahwa Kota Magelang merupakan kota jasa sekaligus kota transit ke daerah-daerah di sekitarnya. Sementara itu, sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi namun *share* PDRB rendah adalah: (1) jasa perusahaan; (2) jasa kesehatan; (3) listrik dan gas; (4) akomodasi dan makan minum; serta (5) jasa lainnya.



**Gambar 4.3** Rata-rata Pertumbuhan dan Sumbangan Lapangan Usaha Kota Magelang Berdasar PDRB Harga Konstan, 2011-2019 (%)

Sumber: BPS Kota Magelang (2020), diolah

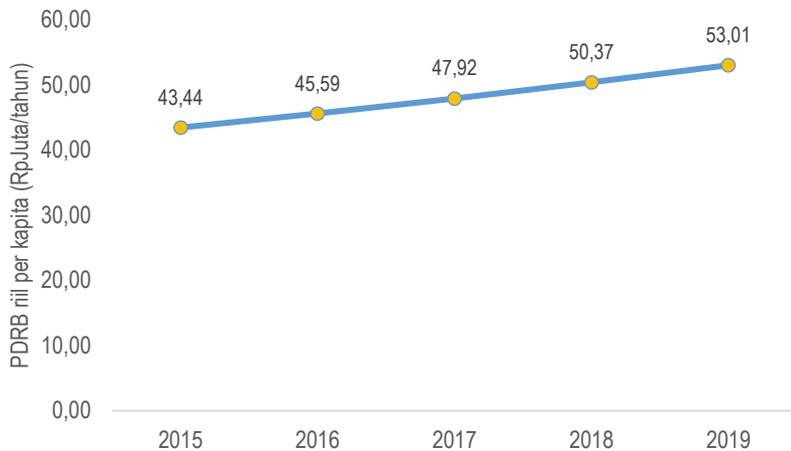
Sektor yang berada pada kelompok dengan pertumbuhan rendah dan *share* PDRB tinggi antara lain: pemerintahan dan perdagangan. Kelompok ini merupakan kelompok yang sudah sangat maju namun tertekan. Artinya, ruang ekonomi yang tersedia untuk kedua kelompok ini sangat terbatas dan hampir mendekati titik maksimumnya. Di sisi lain, sektor pertambangan, air bersih, pertanian, *real estate*, dan jasa keuangan berada pada kelompok dengan pertumbuhan rendah dan *share* PDRB rendah. Kelompok pada kategori ini relatif tertinggal dan untuk memajukannya maka perlu usaha yang besar (misalnya melalui investasi yang banyak).

**Tabel 4.1** Kategorisasi Pertumbuhan dan Sumbangan Lapangan Usaha Kota Magelang, 2011-2019

Lapangan Usaha	Rerata <i>Share</i> (%)	Rerata Pertumbuhan (%)	<i>Share</i>	Pertumbuhan
Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,00	2,39	Rendah	Rendah
Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	Rendah	Rendah
Industri pengolahan	14,79	5,77	Tinggi	Tinggi
Pengadaan listrik dan gas	0,35	7,21	Rendah	Tinggi
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,15	2,47	Rendah	Rendah
Konstruksi	16,75	4,02	Tinggi	Rendah
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	15,78	4,70	Tinggi	Rendah
Transportasi dan pergudangan	7,45	6,77	Tinggi	Tinggi
Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,75	6,08	Rendah	Tinggi
Informasi dan komunikasi	6,08	10,03	Tinggi	Tinggi
Jasa keuangan dan asuransi	4,80	4,86	Rendah	Rendah
<i>Real estate</i>	3,51	5,50	Rendah	Rendah
Jasa perusahaan	0,34	8,22	Rendah	Tinggi
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	11,32	2,73	Tinggi	Rendah
Jasa pendidikan	6,22	10,80	Tinggi	Tinggi
Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	2,57	8,06	Rendah	Tinggi
Jasa lainnya	2,13	5,99	Rendah	Tinggi
<b>Rerata</b>	<b>5,88</b>	<b>5,62</b>		

Sumber: BPS Kota Magelang (2020), diolah

Sementara itu, ditinjau dari segi pendapatan masyarakat, maka PDRB riil per kapita Kota Magelang terus mengalami peningkatan selama periode 2015-2019 (lihat Gambar 4.4). Pada tahun 2015, PDRB riil per kapita Kota Magelang mencapai 43,44 juta Rupiah per tahun dan pada tahun 2019 angkanya naik menjadi 53,01 juta Rupiah per tahun. Artinya, selama periode tersebut kesejahteraan atau daya beli rata-rata masyarakat Kota Magelang mengalami kenaikan.



**Gambar 4.4** PDRB Riil per Kapita Kota Magelang, 2010-2019 (Rp Juta/Tahun)  
Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

#### 4.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan di suatu daerah umumnya dilihat dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Umumnya, indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di daerah

adalah persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 berikut, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Magelang mengalami penurunan selama periode 2015-2019. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Magelang semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di kota ini juga semakin rendah. Menariknya, penurunan kedua indeks tersebut terjadi saat garis kemiskinan di Kota Magelang meningkat. Artinya, daya beli penduduk miskin Kota Magelang selama beberapa tahun terakhir membaik.

**Tabel 4.2** Indikator Kemiskinan Kota Magelang, 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah	Persentase		
2015	405.228	10.920	9,05	1,39	0,31
2016	425.191	10.640	8,79	1,20	0,23
2017	450.908	10.630	8,75	1,30	0,32
2018	476.582	9.590	7,87	1,07	0,21
2019	481.282	9.100	7,46	0,99	0,19

Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

#### 4.1.3. Ketenagakerjaan

Dua indikator yang sering digunakan untuk menilai kondisi ketenagakerjaan di daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menunjukkan persentase angkatan kerja yang bekerja terhadap penduduk usia kerja, sedangkan TPT menunjukkan persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK, maka semakin banyak angkatan kerja yang bekerja di suatu daerah, begitu sebaliknya. Sementara itu, semakin rendah TPT, maka semakin sedikit jumlah pengangguran di suatu daerah, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut, TPAK dan TPT Kota Magelang dari tahun 2014 hingga 2019 sama-sama turun. Penurunan dua indikator ini bisa dimaknai bahwa tenaga kerja di Kota Magelang saat ini lebih banyak merupakan penduduk di luar angkatan kerja. Di samping itu, angkatan

kerja asli Kota Magelang yang seharusnya bisa bekerja di kota ini justru mencari tempat penghidupan di daerah lain.

**Tabel 4.3** TPAK dan TPT Kota Magelang, 2014-2019 (%)

Tahun*	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2014	68,49	7,39
2015	64,35	6,43
2017	65,32	6,68
2018	68,64	4,88
2019	64,62	4,43

Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

Keterangan: \*Data tahun 2016 tidak tersedia

Sementara itu, apabila dirinci menurut lapangan usaha, maka sebagian besar angkatan kerja di Kota Magelang pada tahun 2019 bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (26,43 persen), industri pengolahan (17,08 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (11,48 persen).

**Tabel 4.4** Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Magelang yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2019

No.	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
1	Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	525	0,87
2	Pertambangan dan penggalian	149	0,25
3	Industri pengolahan	10.258	17,08
4	Konstruksi	1.997	3,33
5	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	15.868	26,43
6	Transportasi dan pergudangan	3.179	5,29
7	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6.895	11,48
8	Jasa keuangan dan asuransi	1.748	2,91
9	Jasa perusahaan	1.065	1,77
10	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	5.442	9,06
11	Jasa pendidikan	3.293	5,48
12	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2.754	4,59
13	Jasa lainnya	5.306	8,84

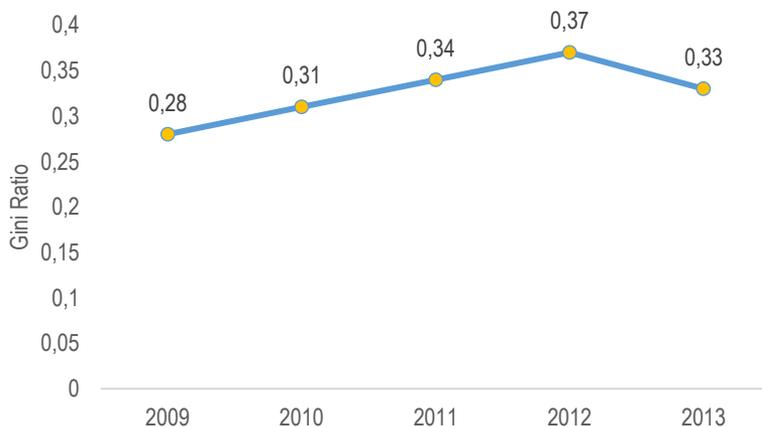
No.	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
14	Kategori lainnya	1.569	2,61
<b>Total</b>		<b>60.048</b>	

Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

#### 4.1.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Rasio ini berkisar antara 0 dan 1. Apabila Gini Ratio = 0, berarti merata mutlak dan apabila Gini Ratio = 1, berarti ketidakmerataan mutlak. Dalam kenyataan Gini Ratio 0 dan 1 tidak mungkin terjadi. Hal ini terjadi karena seluruh pendapatan di suatu daerah tidak mungkin dihasilkan oleh satu orang dan seluruh pendapatan di daerah tersebut tidak mungkin didistribusikan secara merata sempurna. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila Gini Ratio berkisar antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila berkisar antara 0,2 sampai 0,35.

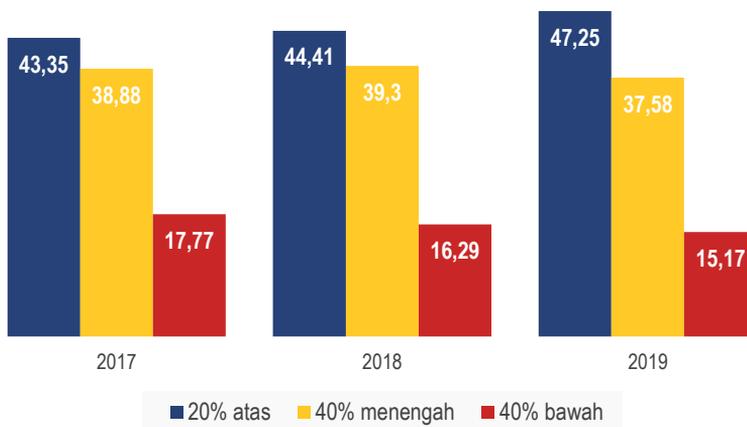
Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5 berikut, Gini Ratio Kota Magelang dari tahun 2009 hingga 2013 cenderung meningkat. Pada tahun 2009, Gini Ratio kota ini mencapai 0,28 dan pada tahun 2013 angkanya naik menjadi 0,33. Meskipun meningkat, namun dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kota Magelang masih relatif rata.



**Gambar 4.5** Gini Ratio Kota Magelang, 2000-2013

Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

Bila diukur dengan indikator lain, seperti distribusi pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia, dan periode yang lebih terkini, tampaknya distribusi pendapatan di Kota Magelang semakin timpang. Pada tahun 2017, 40 persen kelompok pengeluaran terbawah masih menikmati 17,77 persen pendapatan, namun pada tahun 2019 proporsinya turun menjadi 15,17 persen. Sementara itu, 20 persen kelompok pengeluaran atas menikmati 43,35 persen pendapatan pada tahun 2017 dan dua tahun kemudian proporsinya naik menjadi 47,25 persen.



**Gambar 4.6** Distribusi Pengeluaran Penduduk Kota Magelang berdasarkan Kriteria Bank Dunia, 2017-2019 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2020b)

## 4.2. Gambaran Inflasi Kota Magelang

### 4.2.1. Inflasi Bulanan dan Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran

Data inflasi bulanan Kota Magelang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya terjadi minimal dua kali deflasi. Inflasi di Kota Magelang erat kaitannya dengan hari besar keagamaan, terutama hari besar agama Islam (bulan puasa dan hari raya Idul Fitri). Hal ini dapat dilihat pada bulan-bulan dimana bulan puasa dan hari raya Idul Fitri terjadi maka inflasi yang tinggi akan terjadi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selain itu, inflasi Kota

Magelang juga dipengaruhi oleh cuaca dan iklim serta kebijakan pemerintah, baik pada tingkat daerah, provinsi dan pusat.

**Tabel 4.5** Tingkat Inflasi Bulanan di Kota Magelang (2012=100), 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	-0,19	0,40	1,23	0,71	0,22
Februari	-0,43	-0,13	0,49	0,35	-0,31
Maret	0,05	0,42	-0,09	0,17	0,24
April	0,11	-0,48	0,08	-0,05	0,37
Mei	0,44	0,12	0,57	0,02	0,26
Juni	0,47	0,49	0,91	0,73	0,37
Juli	0,05	0,70	0,07	0,08	0,34
Agustus	0,21	-0,48	-0,55	-0,21	0,28
September	-0,05	0,03	0,03	-0,06	-0,12
Oktober	0,07	0,17	0,03	0,31	0,01
November	0,31	0,72	0,16	0,22	0,17
Desember	0,06	0,27	0,93	0,36	0,33

Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

Data inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kota Magelang tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa inflasi kota ini sangat dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan (*volatile food*). Jika dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang dalam kurun waktu yang sama menunjukkan nilai sebesar 1,89 persen, maka dapat dikatakan bahwa *supply* bahan makanan ke Kota Magelang sangat tergantung pada wilayah lain yang menyebabkan perubahan harga pada kelompok ini menjadi sulit dikendalikan.

Data tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa kelompok komoditi transport, komunikasi, dan jasa keuangan memiliki kontribusi yang besar terhadap inflasi di Kota Magelang. Hal ini lebih disebabkan karena adanya perubahan harga BBM serta harga pada sektor transportasi. Kelompok komoditi ini merupakan kelompok *administrative goods*, artinya harga barang dan jasa pada kelompok ini ditentukan oleh pemerintah.

Kelompok sandang merupakan kelompok pengeluaran yang memiliki pertumbuhan yang cepat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan kelompok ini sebesar 57,37 persen per tahun. Kota Magelang merupakan kota perdagangan bagi wilayah-wilayah disekitarnya. Hal ini dapat

dilihat dari rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 15,95 persen per tahun.

**Tabel 4.6** Tingkat Inflasi per tahun menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Magelang (2012=100), 2015-2019

<b>Kelompok Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bahan makanan	4,55	2,24	4,25	2,60	6,56
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	3,89	3,45	1,26	1,90	1,87
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	4,03	0,91	5,77	2,16	0,64
Sandang	1,05	2,96	3,9	4,00	4,53
Kesehatan	3,13	5,43	2,96	1,37	1,92
Pendidikan, rekreasi, dan olah raga	5,46	4,43	1,59	0,83	0,58
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	-4,10	-0,26	6,08	5,67	-0,72
Umum	2,71	2,26	3,90	2,65	2,19

Sumber: BPS Kota Magelang (2020)

#### 4.2.2. Perkembangan Harga Beberapa Komoditi Strategis, Pangan, serta Sayur dan Buah-buahan di Kota Magelang

Data harga komoditi yang diperjualbelikan di suatu wilayah merupakan salah satu data yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka mengetahui perkembangan harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Hal ini terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah tersebut dalam rangka mengendalikan harga sehingga mendukung stabilitas perekonomian setempat. Kota Magelang merupakan salah satu kota yang menganggap bahwa data merupakan sumber lahirnya kebijakan publik yang baik. Perlu dipahami bahwa penggambaran data perkembangan harga beberapa komoditi ini tidak berkaitan dengan proyeksi inflasi yang menjadi tujuan utama dalam kajian ini.

Pengelolaan data sektoral di Kota Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dan didukung pada tahun-tahun selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah. Implementasi satu data di Kota Magelang melalui DataGO ([datago.magelangkota.go.id](http://datago.magelangkota.go.id)) telah menjadi rujukan berbagai

pihak di Indonesia dan merupakan pengelolaan data sektoral terbaik di Jawa Tengah. Keberadaan DataGO dan portal data terbuka Kota Magelang yang telah terintegrasi dengan portal Satu Data Jawa Tengah dan Satu Data Indonesia berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2019.

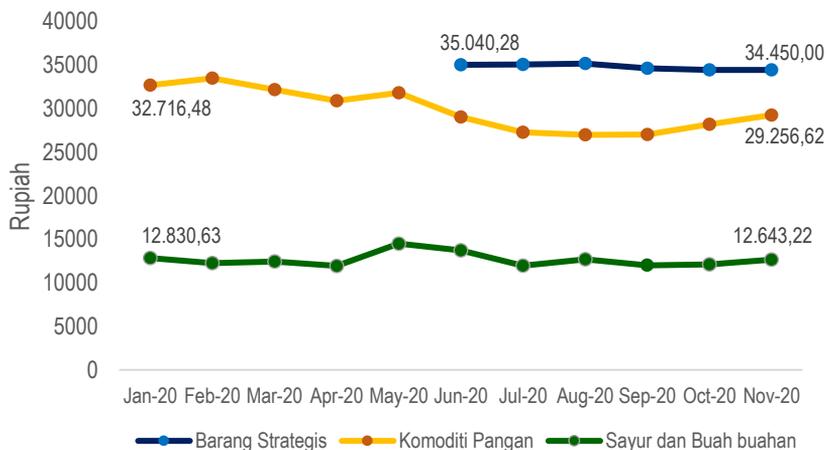
Salah satu data yang terdapat di DataGO adalah data terkait dengan harga *realtime* dari beberapa komoditi pokok yang diperjualbelikan di beberapa pasar di Kota Magelang. Data harga ini juga menjadi sumber bagi berbagai pihak dalam rangka menyusun kebijakan pengendalian inflasi, salah satunya adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang. Untuk mendukung kinerja TPID maka pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mengembangkan DataGO sebagai *early warning system* dalam bentuk aplikasi IndiGO (Pemantauan Inflasi melalui DataGO).

Hasil pengumpulan data dari aplikasi DataGO selama satu tahun ini diperoleh bahwa pergerakan harga dari segi nilai cenderung menurun untuk semua jenis kelompok komoditi. Untuk kelompok komoditi barang strategis yang mulai pengambilan datanya pada bulan Juni 2020 mengalami penurunan hingga 1,68 persen. Sedangkan untuk kelompok komoditi pangan mengalami penurunan juga hingga mencapai 11,91 persen (periode Januari–November 2020). Kelompok komoditi sayur dan buah-buahan juga mengalami penurunan sebesar 1,37 persen pada periode yang sama (lihat Gambar 4.7).

Jika dilihat rata-rata perubahan harga per bulan pada periode pengamatan diperoleh bahwa kelompok komoditi sayur dan buah-buahan mengalami peningkatan harga hingga 0,22 persen. Di mana peningkatan harga tertinggi terjadi pada bulan Mei 2020 (mencapai 21,44 persen), sedangkan penurunan harga terendah terjadi pada bulan Juli 2020 (mencapai 5,34 persen). Untuk kelompok komoditi pangan dan kelompok komoditi barang strategis menunjukkan penurunan yaitu 1,02 persen dan 0,34 persen secara berturut-turut (lihat Gambar 4.8).

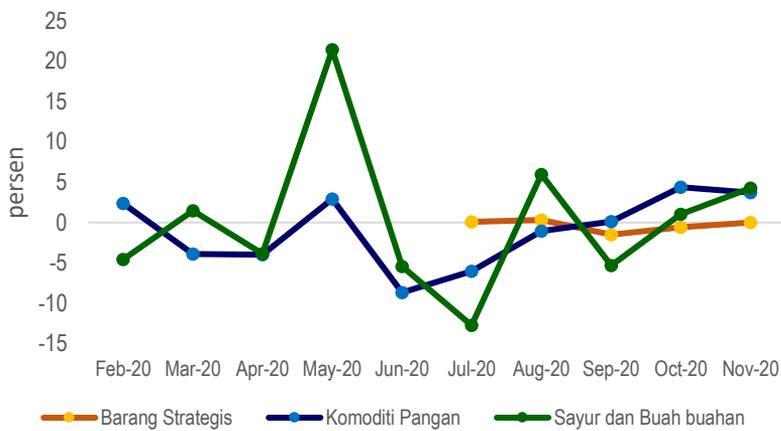
Data pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa komoditi yang tergabung dalam kelompok komoditi barang strategis sebagian besar tidak mengalami perubahan harga selama periode pengamatan. Namun, untuk komoditi kayu meranti papan (10x2x200cm) mengalami peningkatan tertinggi sebesar 8,18 persen selama periode pengamatan. Sedangkan penurunan terendah pada komoditi paku panjang 20 mm dengan rata-rata penurunan sebesar 2,49 persen.

Data pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa komoditi yang tergabung dalam kelompok Komoditi Pangan sebagian besar mengalami perubahan harga selama periode pengamatan. Komoditi cabe merah besar mengalami peningkatan tertinggi sebesar 6,17 persen selama periode pengamatan. Sedangkan penurunan terendah pada komoditi cabe rawit merah dengan rata-rata penurunan sebesar 2,49 persen pada periode yang sama. Namun, kelompok komoditi ini perlu mendapat perhatian khusus karena fluktuasi yang cukup tinggi antar waktu. Misalnya, untuk komoditi cabe rawit merah yang pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan harga terendah hingga 48,01 persen, namun pada bulan berikutnya mengalami peningkatan harga hingga 7,78 persen. Jika dilihat dari struktur perekonomian Kota Magelang di mana kontribusi sektor pertanian sangat kecil terhadap PDRB, maka hal ini menjadi wajar karena sebagian besar komoditi ini didatangkan dari luar Kota Magelang.



**Gambar 4.7** Rata-Rata Harga Kelompok Barang Strategis, Komoditas Pangan, serta Sayur dan Buah-Buahan di Kota Magelang dari Januari-November 2020

Untuk komoditi buncis mengalami peningkatan tertinggi sebesar 5,99 persen selama periode pengamatan. Sedangkan penurunan terendah pada komoditi wortel dengan rata-rata penurunan sebesar 4,45 persen. Kelompok komoditi ini juga mengalami fluktuasi yang tinggi setiap bulannya sehingga perlu diperlukan pemantauan yang rutin terhadap harga-harga komoditi ini.



**Gambar 4.8** Rata-Rata Persentase Kenaikan Harga Kelompok Barang Strategis, Komoditas Pangan, serta Sayur dan Buah-Buahan di Kota Magelang per bulan dari Februari-November 2020

**Tabel 4.7** Perkembangan Harga Beberapa Komoditi yang Berada pada Kelompok Komoditi Barang Strategis Periode Juli–November 2020

No	Komoditi	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Rata-rata
1	Besi beton (SNI) 10 mm	-	-	-	-	-	-
2	Besi beton (SNI) 12 mm	-	-	-	-	-	-
3	Besi beton (SNI) 6 mm	-	-	-	-	-	-
4	Besi beton (SNI) 8 mm	-	-	-	-	-	-
5	Elpiji 12kg	(1,60)	-	(5,15)	(2,04)	-	(1,76)
6	Elpiji 3kg	(1,05)	-	(2,31)	(0,89)	-	(0,85)
7	Kayu meranti balok (4x6x400 cm)	-	-	-	-	-	-
8	Kayu meranti papan (10x2x200 cm)	18,02	12,72	7,52	2,62	-	8,18
9	Paku panjang 100 mm	-	-	-	-	-	-
10	Paku panjang 20 mm	-	-	(8,84)	(3,63)	-	(2,49)
11	Paku panjang 30 mm	-	-	(6,12)	(2,44)	-	(1,71)
12	Paku panjang 40 mm	-	-	(8,56)	(3,51)	-	(2,41)
13	Paku panjang 50 mm	-	-	-	-	-	-
14	Paku panjang 70 mm	-	-	-	-	-	-
15	Pupuk KCL	-	-	-	-	-	-

No	Komoditi	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Rata-rata
16	Pupuk NPK	-	-	-	-	-	-
17	Pupuk organik	-	-	-	-	-	-
18	Pupuk SP36	-	-	-	-	-	-
19	Pupuk urea	-	-	-	-	-	-
20	Pupuk ZA	-	-	-	-	-	-
21	Semen merk Gresik 40Kg	-	-	(2,41)	(0,93)	-	(0,67)
22	Semen merk Holchim 40KG	-	-	(1,86)	(0,71)	-	(0,52)
23	Semen merk Tiga Roda 40Kg	-	-	-	-	-	-
24	Tripex 6 mm	-	-	-	-	-	-

Catatan: tanda dash “-“ diartikan tidak ada perubahan harga

**Tabel 4.8** Perkembangan Harga Beberapa Komoditi yang Berada pada Kelompok Komoditi Pangan Periode Juli-November 2020

Komoditi	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Rata-rata
Bawang merah lokal (per kilogram)	(29,52)	(20,45)	1,52	17,18	16,01	3,42
Bawang putih kating (per kilogram)	(6,17)	13,96	11,95	-	14,82	0,57
Beras IR64 Kw medium (per kilogram)	(3,03)	2,90	-	-	-	(0,30)
Beras IR64 Kw premium (per kilogram)	0,12	1,13	(0,07)	-	-	0,50
Cabe merah besar (per kilogram)	16,62	9,10	8,30	118,88	14,43	6,17
Cabe merah keriting (per kilogram)	15,77	1,20	5,37	93,57	18,03	2,65
Cabe rawit hijau (per kilogram)	15,70	3,12	(11,14)	9,41	7,54	(3,08)
Cabe rawit merah (per kilogram)	(0,60)	(18,47)	(10,85)	49,67	41,35	(3,73)
Daging ayam kampung (per kilogram)	(1,16)	(0,41)	(2,04)	(5,12)	3,72	(0,06)
Daging ayam ras (per kilogram)	(4,68)	(12,33)	(1,81)	2,69	5,59	0,44
Daging sapi (per kilogram)	-	-	-	-	-	0,12
Garam beryodium bata (1/buah)	-	-	-	-	-	-

<b>Komoditi</b>	<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Rata-rata</b>
Garam beryodium hancur (per 250gram)	-	-	-	-	-	-
Gula pasir kristal putih Kw. medium (per kilogram)	(14,72)	(1,25)	(0,14)	(2,70)	-	(0,69)
Ikan laut kembung	-	-	-	-	-	0,00
Ikan laut teri (per kilogram)	-	-	-	-	-	0,07
Jagung pipilan kering	-	-	-	-	-	(0,89)
Kacang hijau (per kilogram)	(11,44)	(6,11)	(3,76)	(1,41)	(2,07)	1,06
Kacang kedelai lokal (Kg)	-	-	-	-	-	0,73
Kacang tanah (per kilogram)	(5,43)	(3,32)	0,22	(1,15)	(0,26)	0,39
Mie instan	-	-	-	-	-	0,05
Minyak goreng bimoli (per liter)	-	-	-	3,32	0,51	0,38
Minyak goreng tanpa merk (per liter)	(4,67)	5,18	7,65	4,13	(1,27)	0,55
Susu bubuk Dancow Full Cream (400gr)	-	-	-	-	-	0,14
Susu bubuk Indomilk Cokelat (400gr)	-	-	-	-	-	0,13
Susu kental Bendera Coklat (385gr)	-	-	-	-	-	-
Susu kental Indomilk Plain (385gr)	-	-	-	-	-	-
Telur ayam kampung (per 21 butir)	(3,46)	(2,99)	-	-	-	(0,24)
Telur ayam ras (per kilogram)	4,72	(2,34)	(8,78)	0,21	7,99	0,77
Tepung terigu (per kilogram)	-	-	-	-	-	(0,36)

Catatan: tanda dash “-“ diartikan tidak ada perubahan harga

**Tabel 4.9** Perkembangan Harga Beberapa Komoditi yang Berada pada Kelompok Sayur dan Buah-Buahan Periode Juli–November 2020

No	Komoditi	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Rata-rata
1	Alpokot	10,42	(12,45)	(13,01)	(10,46)	(13,57)	2,00
2	Apel	(18,26)	(11,65)	(9,09)	-	-	0,73
3	Bawang daun	7,73	11,44	(4,78)	21,87	(23,22)	(2,47)
4	Bayam	(4,08)	(2,69)	5,28	0,57	-	(0,89)
5	Belimbing	5,41	(2,78)	(18,18)	(0,17)	28,42	1,71
6	Buncis	(9,41)	2,42	32,28	15,99	(5,67)	5,99
7	Jeruk	(17,41)	2,26	(4,59)	6,27	20,68	(0,16)
8	Kacang merah	1,53	2,77	(16,29)	1,30	(0,56)	(0,98)
9	Kacang panjang	2,94	3,89	15,51	(28,92)	62,46	1,60
10	Kangkung	(3,08)	9,26	6,78	7,56	6,25	4,04
11	Kembang kol	(16,72)	(17,75)	1,78	24,93	12,88	2,06
12	Kentang	(10,67)	11,46	(1,32)	14,67	(13,55)	(0,05)
13	Kubis	(22,26)	(6,85)	0,57	(2,03)	64,32	4,93
14	Labu siam/jipang	(0,69)	(18,80)	14,89	11,11	-	0,28
15	Mangga	(9,64)	1,15	(7,58)	(23,42)	(22,19)	(3,68)
16	Nanas	(8,08)	2,38	(2,33)	-	(1,36)	(1,41)
17	Pepaya	-	(6,67)	(14,29)	4,41	(24,75)	(3,98)
18	Sawi	(23,20)	0,85	51,30	18,86	(42,88)	1,84
19	Semangka	6,25	(9,15)	(8,18)	0,38	(5,00)	0,08
20	Sirsak	(14,75)	25,00	(19,09)	(1,12)	38,10	0,08
21	Terong	21,90	(33,26)	(11,62)	(3,93)	-	2,25
22	Timun	7,53	(10,62)	66,72	(0,94)	(41,90)	1,51
23	Tomat	8,39	(20,14)	(24,58)	1,94	96,81	5,51
24	Wortel	(6,07)	(8,99)	(8,40)	(10,58)	2,67	(4,45)

Catatan: tanda dash “-” diartikan tidak ada perubahan harga

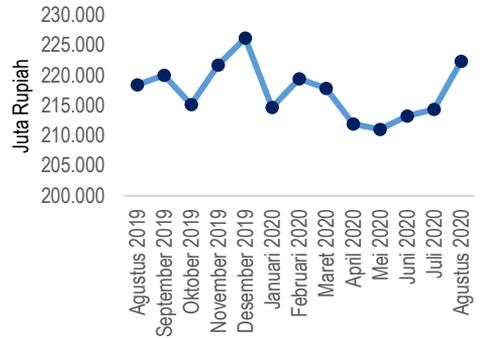
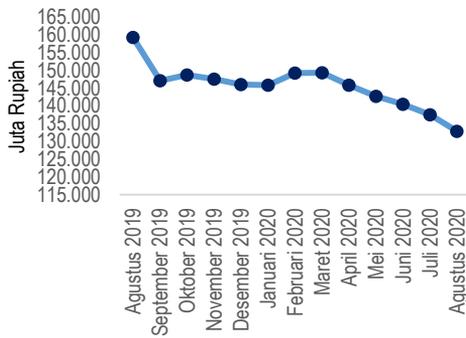
#### 4.3. Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Kota Magelang

Salah satu isu global yang terjadi pada akhir tahun 2019 adalah munculnya pandemic *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa dikenal dengan Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo melaporkan dua kasus konfirmasi Covid-19 pertama di Indonesia (Djalente *et al.*, 2020).

Semenjak kasus pertama tersebut, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Penambahan jumlah kasus tersebut tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian secara keseluruhan. Di Jawa Tengah, beberapa dampak yang dapat diobservasi menurut survei BPS Provinsi Jawa Tengah (2020a, 2020b) antara lain:

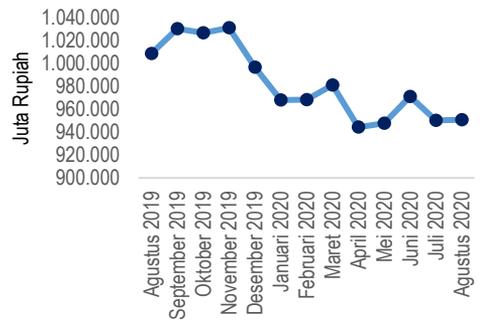
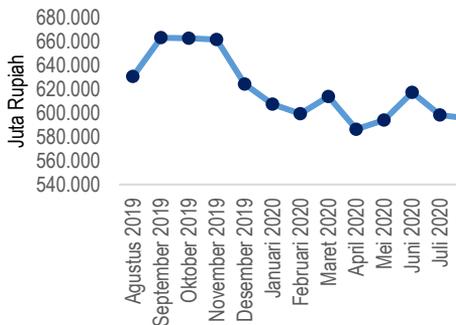
1. Secara umum, pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan sebagian besar masyarakat mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelum wabah Covid-19.
2. Masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi Covid-19.
3. Pekerjaan yang paling terdampak adalah di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum.
4. Kabupaten Sragen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga dan Kabupaten Batang menjadi wilayah yang pelaku usahanya paling banyak mengalami penurunan pendapatan.
5. Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang pelaku usahanya paling banyak mengalami penurunan permintaan.

Dampak pandemi Covid-19 yang dapat diobservasi di Kota Magelang adalah penyaluran kredit kepada UMKM. Total kredit yang disalurkan Bank Umum kepada UMKM mengalami penurunan sepanjang Agustus 2019 hingga Agustus 2020. Jika dirinci menurut kategori usaha, maka kredit kepada usaha mikro dan usaha menengah juga mengalami penurunan. Sementara itu, kredit kepada usaha kecil justru meningkat selama periode tersebut.



Kredit UMKM pada Usaha Mikro

Kredit UMKM pada Usaha Kecil



Kredit UMKM pada Usaha Menengah

Total Kredit UMKM

**Gambar 4.9** Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum di Kota Magelang menurut Kategori Usaha, Agustus 2019–Agustus 2020 (Juta Rp)  
Sumber: Bank Indonesia (2020).

Jika dirinci menurut lapangan usaha, maka UMKM di sektor konstruksi serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor secara konsisten mengalami penurunan penyaluran kredit sepanjang Agustus 2019 hingga Agustus 2020.

**Tabel 4.10** Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum di Kota Magelang menurut Lapangan Usaha, Agustus 2019–Agustus 2020 (Juta Rp)

No.	Lapangan Usaha	Agt 2019	Des 2019	Mar 2020	Agt 2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	22.883	25.089	23.990	29.653
2	Pertambangan dan penggalian	1.265	969	-	-
3	Industri pengolahan	98.073	105.164	106.428	106.014
4	Pengadaan listrik dan gas	3.004	1.969	1.031	1.034
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	150	129	113	339
6	Konstruksi	32.489	25.905	23.066	22.300
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	664.866	660.159	659.860	619.870
8	Transportasi dan pergudangan	20.900	12.009	6.554	12.762
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	60.511	61.994	60.157	58.826
10	Informasi dan komunikasi	628	805	730	627
11	Jasa keuangan dan asuransi	12.609	8.847	6.781	6.965
12	<i>Real estate</i>	14.532	15.030	14.184	15.002
13	Jasa perusahaan	15.517	13.548	14.257	13.662
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	31	2	-	-
15	Jasa pendidikan	8.825	10.036	9.542	8.763
16	Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	3.429	9.100	8.756	7.503
17	Jasa lainnya	48.750	45.829	45.557	47.252

Sumber: Bank Indonesia (2020)

#### 4.4. Proyeksi Inflasi Kota Magelang Tahun 2020

Proyeksi inflasi Kota Magelang tahun 2020 didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. BPS Kota Magelang tidak melakukan perhitungan inflasi Kota Magelang mulai awal tahun 2020 karena adanya perubahan tahun dasar dari 2012 menjadi 2018, dimana perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap perubahan pembobotan dalam perhitungan setiap komoditi penyumbang inflasi yang diperoleh dari SBH.
2. Kebutuhan Pemerintah Kota Magelang terhadap nilai inflasi untuk mengukur kinerja pembangunan yang telah dilakukan dan dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
3. Kebutuhan dunia usaha terkait dengan prospek pengembangan investasi di Kota Magelang.

Proyeksi inflasi yang dilakukan tidak dapat menunjukkan satu nilai tertentu tetapi merupakan satu rentang nilai. Hal ini lebih disebabkan karena pendekatan yang digunakan adanya pendekatan proyeksi bukan nilai riil yang diperoleh dari pendataan secara langsung yang selama ini dilakukan oleh BPS Kota Magelang. Proyeksi inflasi Kota Magelang didekati dengan menggunakan pendekatan *time trend*, *deflator* PDRB, model pembobotan, dan Tipologi Klassen.

#### 4.3.1. Analisis Time Trend

Analisis *time trend* merupakan analisis sederhana dalam melakukan *forecasting*. Hasil analisis ini akan memiliki keakurasian yang mendekati kenyataan jika memiliki data series yang panjang serta memiliki pola yang jelas. Data inflasi Kota Magelang saat ini yang tersedia hanya 12 tahun (2008–2019) dan memiliki pola yang cenderung menurun.



**Gambar 4.10** Hasil Observasi Inflasi Kota Magelang (2008–2019) serta Hasil Proyeksi, Upper dan Lower Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2020); Hasil analisis Tim Peneliti (2020)

Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi Kota Magelang dalam kondisi normal (artinya tidak ada guncangan dalam perekonomian baik dari sisi *supply* maupun sisi *demand*) maka pada tahun 2020 akan mencapai 2,05, dimana *bond of error on estimation* dari analisis ini adalah 1,14. Sehingga nilai rentang inflasi di Kota Magelang antara 0,91 persen hingga 3,19 persen pada tahun 2020.

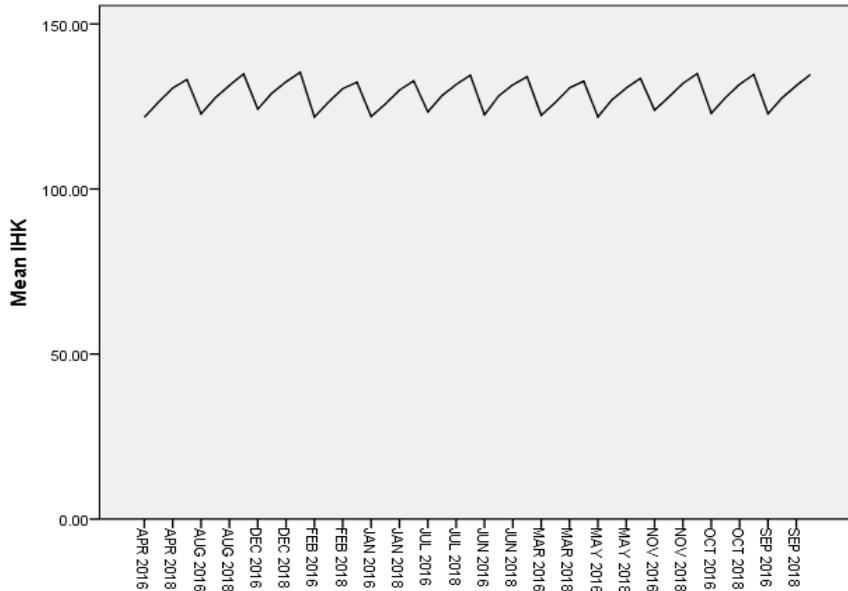
**Tabel 4.11** Proyeksi Berbagai Lembaga terkait Inflasi Indonesia Tahun 2020

Lembaga	Inflasi Indonesia	Sumber
Bank Indonesia (target inflasi)	2% hingga 4%	PMK No. 124/PMK.010/2017 tanggal 18 September 2017
OECD	2% hingga 4%	OECD Economic Outlook 2020
ADB	2% hingga 3%	Asian Development Outlook 2020
IMF	2,1%	World Economic Outlook IMF (Oktober 2020)

Pada awal tahun 2020 (Maret), Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal ini memberikan dampak terhadap perlambatan ekonomi setiap negara. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah adanya inflasi yang rendah. Hasil proyeksi berbagai lembaga menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2020 akan berkisar antara 2 hingga 4 persen. Artinya, terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,72 persen atau meningkat sebesar 1,28 persen. Jika diasumsikan kondisi tersebut terjadi sama di seluruh Indonesia, maka inflasi Kota Magelang akan berada direntang nilai hingga 1,47 persen hingga 3,47 persen pada tahun 2020.

#### 4.3.2. *Specific Seasonal Index*

Model *specific seasonal index* digunakan untuk melihat pergerakan IHK Kota Magelang yang memiliki pola yang mirip antar periode. Periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 12 bulan.



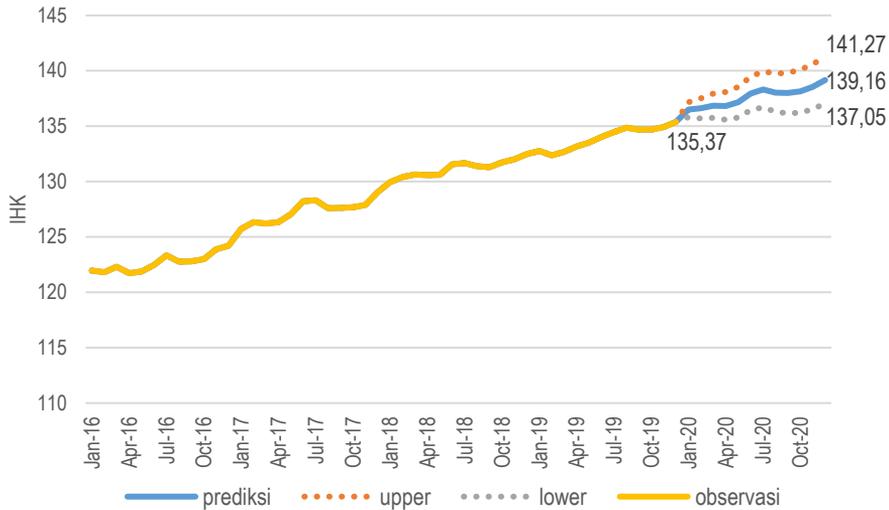
**Gambar 4.11** Mean IHK selama periode 2016–2019

Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)

**Tabel 4.12** Hasil Proyeksi IHK, *Upper* dan *Lower* Tahun 2020

Bulan	IHK			Inflasi Bulanan		
	Proyeksi	Upper	Lower	Proyeksi	Upper	Lower
Januari	136,49	137,15	135,82	0,83	1,31	0,33
Februari	136,61	137,51	135,71	0,09	0,26	-0,08
Maret	136,84	137,93	135,76	0,17	0,31	0,04
April	136,83	138,07	135,59	-0,01	0,1	-0,13
Mei	137,15	138,53	135,77	0,23	0,33	0,13
Juni	137,95	139,45	136,44	0,58	0,66	0,49
Juli	138,32	139,95	136,7	0,27	0,36	0,19
Agustus	138,03	139,76	136,3	-0,21	-0,14	-0,29
September	137,99	139,82	136,15	-0,03	0,04	-0,11
Oktober	138,15	140,08	136,22	0,12	0,19	0,05
November	138,55	140,58	136,53	0,29	0,36	0,23
Desember	139,16	141,27	137,05	0,44	0,49	0,38
<b>Inflasi yoy</b>				<b>2,80</b>	<b>4,36</b>	<b>1,24</b>

Hasil analisis dengan menggunakan metode *specific seasonal index* diperoleh bahwa inflasi Kota Magelang tahun 2020 sebesar 2,80 persen. Hasil analisis juga menunjukkan nilai proyeksi tertinggi inflasi tahun 2020 di Kota Magelang sebesar 4,36 persen dan terendah sebesar 1,24 persen. Jika mempertimbangkan efek dari pandemi Covid-19, maka nilai rentang inflasi di Kota Magelang tahun 2020 antara 2,08 persen hingga 4,08 persen.



**Gambar 4.12** Hasil Observasi IHK Kota Magelang (2008–2019) serta Hasil Proyeksi, *Upper* dan *Lower* Tahun 2020

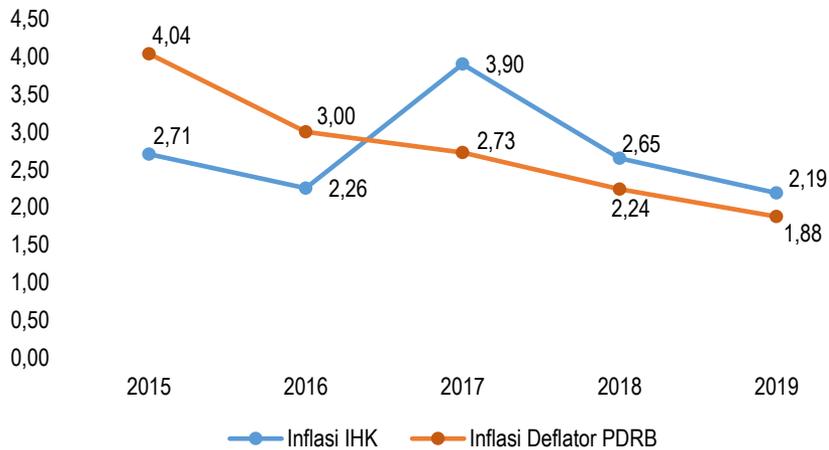
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2020); Hasil analisis tim peneliti (2020)

#### 4.3.3. Deflator PDRB

Deflator PDRB merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat tingkat inflasi di Kota Magelang. Pendekatan ini tidak hanya mengukur perubahan harga pada komoditi barang dan jasa tertentu seperti perhitungan IHK, namun terhadap seluruh komoditi yang diperdagangkan dalam satu wilayah. Kelemahan dari pendekatan ini adalah komoditi yang diperdagangkan setiap tahunnya mengalami perubahan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola inflasi dengan perhitungan IHK dengan deflator PDRB memiliki ketidaksamaan selama periode pengamatan

(2015-2019). Pada periode 2015-2016, nilai inflasi yang diperoleh dari deflator PDRB lebih tinggi dari nilai inflasi yang diperoleh dari IHK. Sedangkan pada periode 2017-2019, mengalami pola yang terbalik, di mana nilai inflasi IHK lebih tinggi dari nilai inflasi deflator PDRB. Hasil yang sama juga diperoleh pada 6 kota inflasi di Jawa Tengah (lihat Tabel 4.8).



**Gambar 4.13** Inflasi Kota Magelang dengan Metode IHK vs Deflator PDRB

Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)

**Tabel 4.13** Perbandingan dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah

Kota Inflasi	Perhitungan Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019
Cilacap	IHK	2,63	2,77	4,41	3,21	2,19
	Deflator PDRB	1,41	(4,70)	2,30	2,49	1,68
Purwokerto	IHK	2,52	2,42	3,91	2,98	2,28
	Deflator PDRB	4,69	2,11	2,02	2,82	1,69
Kudus	IHK	3,28	2,32	4,17	3,11	3,02
	Deflator PDRB	2,76	4,44	4,49	3,74	3,02
Kota Surakarta	IHK	2,56	2,15	3,10	2,45	2,94
	Deflator PDRB	3,44	2,52	2,80	2,37	2,14
Kota Semarang	IHK	2,56	2,32	3,64	2,76	2,93
	Deflator PDRB	3,86	3,47	2,16	2,74	2,18
Kota Tegal	IHK	3,95	2,71	4,03	3,08	2,56
	Deflator PDRB	3,50	3,29	2,54	2,52	2,47
Kota Magelang	IHK	2,71	2,26	3,90	2,65	2,19

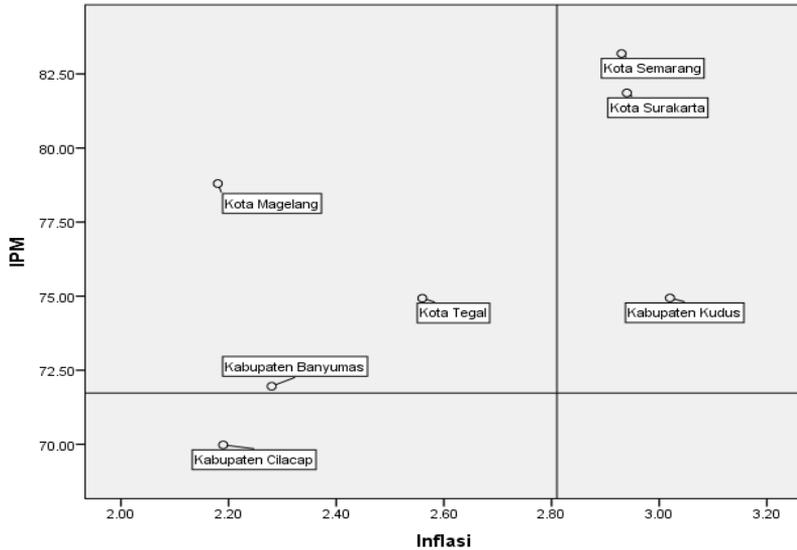
Kota Inflasi	Perhitungan Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019
	Deflator PDRB	4,04	3,00	2,73	2,24	1,88

Sumber: BPS Kota Magelang (2020); Hasil analisis tim peneliti (2020)

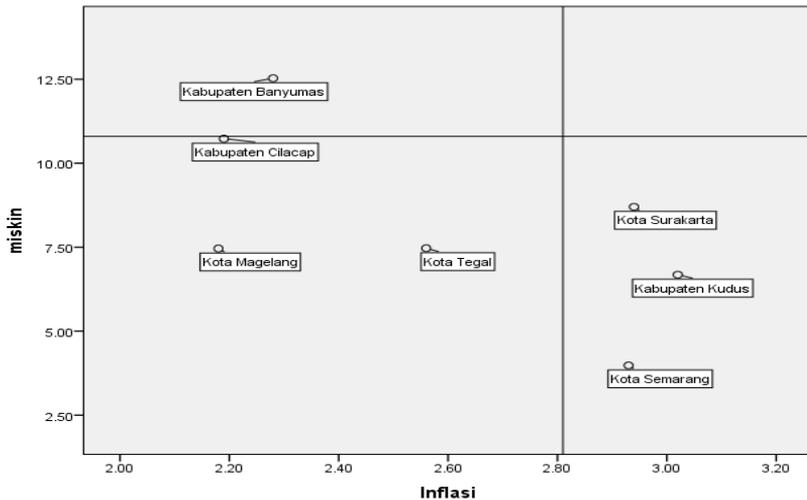
Nilai proyeksi inflasi Kota Magelang dengan menggunakan pendekatan *time trend* untuk deflator PDRB diperoleh nilai sebesar 1,25 persen dengan *bound of error on estimation* sebesar 0,37. Artinya, inflasi Kota Magelang diproyeksi berada dikisaran nilai sebesar 0,88 persen hingga 1,62 persen. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa target inflasi Indonesia sebelum adanya pandemi adalah  $3\pm 1$  persen. Artinya, inflasi Indonesia berada dikisaran nilai 2 hingga 4 persen pada tahun 2020. Jika kondisi ini sama dengan hasil proyeksi yang dilakukan maka inflasi Kota Magelang akan berada di kisaran nilai 1,16 persen hingga 3,16 persen di tahun 2020.

#### 4.3.4. Tipologi Klassen

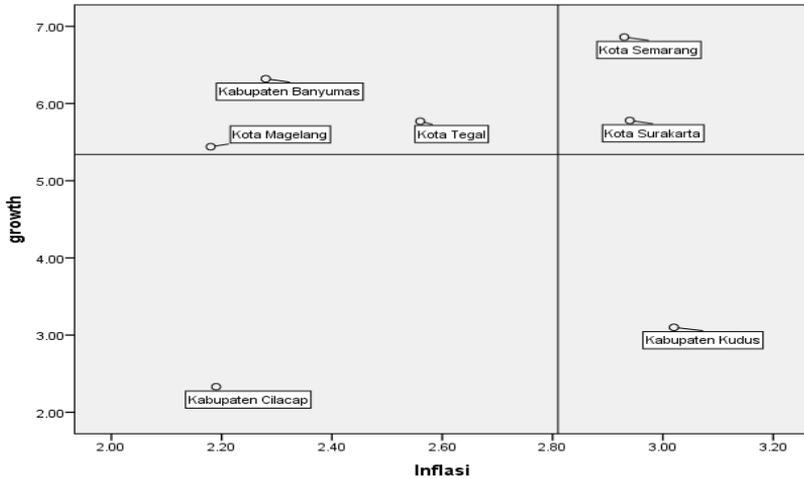
Metode tipologi Klassen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh kota acuan atau kota pembandingan bagi Kota Magelang berdasarkan karakteristik sosial ekonomi. Indikator yang digunakan, antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin (%), pertumbuhan ekonomi (%), PDRB, PDRB per kapita, dan *share* sektor industri pengolahan terhadap PDRB.



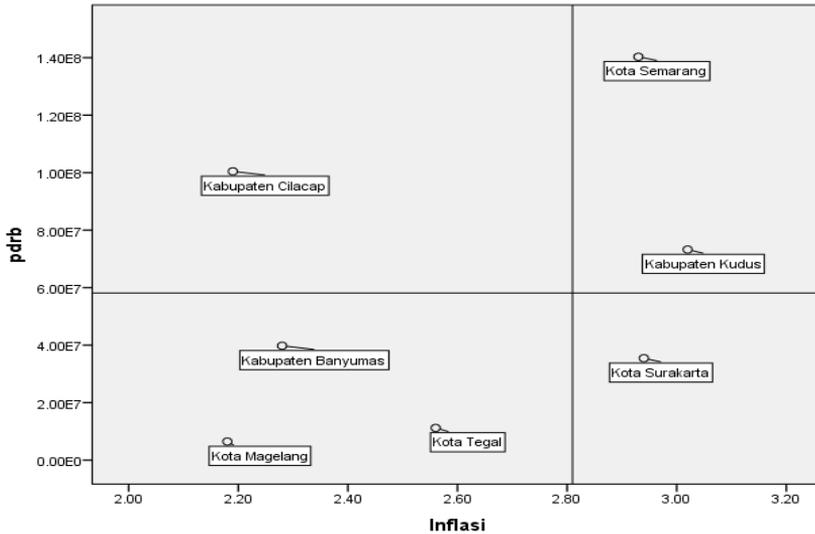
**Gambar 4.14** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan IPM  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)



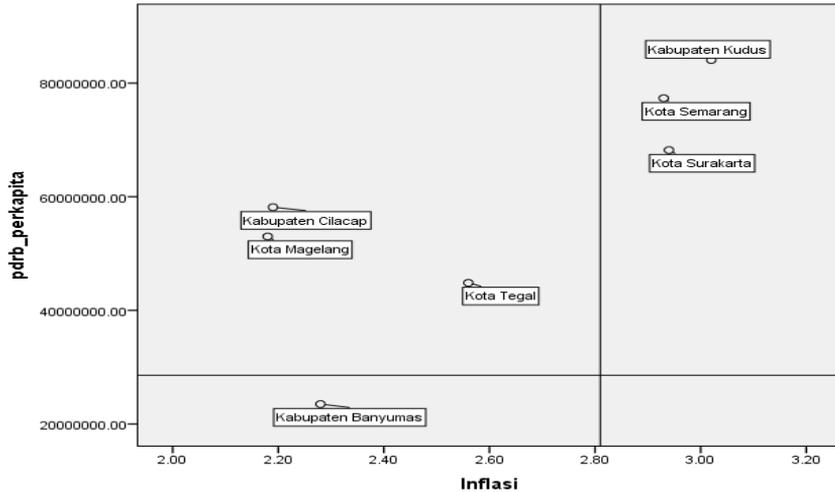
**Gambar 4.15** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan Persentase Penduduk Miskin  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)



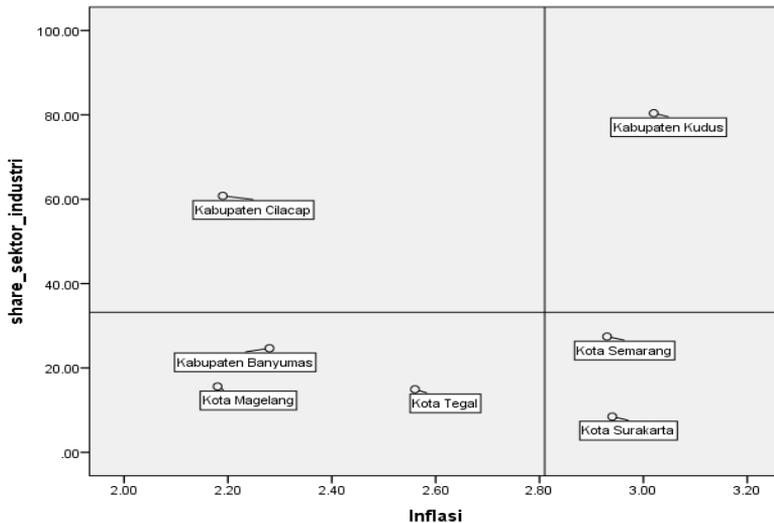
**Gambar 4.16** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)



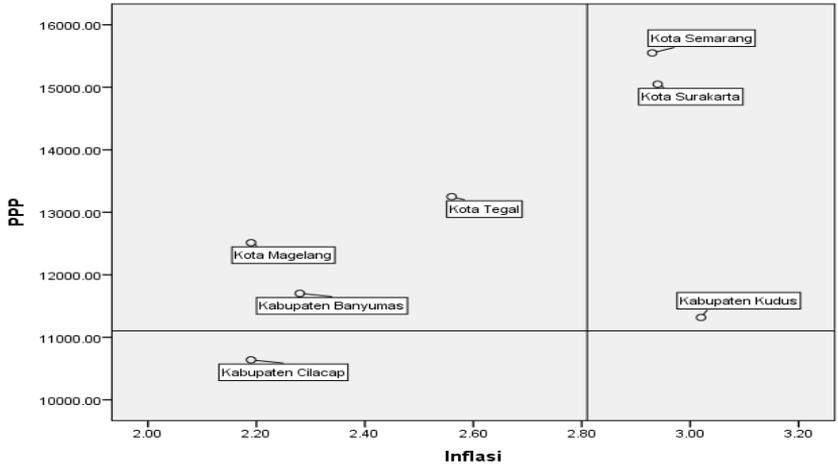
**Gambar 4.17** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan PDRB  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)



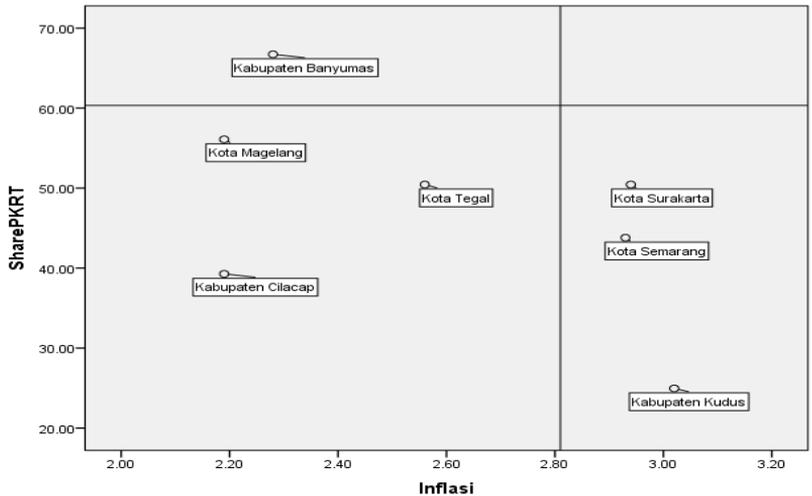
**Gambar 4.18** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan PDRB per Kapita  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)



**Gambar 4.19** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan Share Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)



**Gambar 4.20** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan *Purchasing power parity* (PPP)  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)



**Gambar 4.21** Analisis Kemiripan Wilayah antara Kota Magelang dengan 6 Kota Inflasi di Jawa Tengah berdasarkan Inflasi dan *Share* Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB ADHB  
 Sumber: Hasil analisis tim peneliti (2020)

Hasil analisis dengan menggunakan tipologi Klassen menunjukkan bahwa Kota Magelang mirip dengan beberapa kota inflasi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. IPM → Kota Tegal, Kabupaten Banyumas
2. Persentase penduduk miskin → Kota Tegal, Kabupaten Cilacap
3. Pertumbuhan ekonomi → Kota Tegal, Kabupaten Banyumas
4. PDRB → Kota Tegal, Kabupaten Banyumas
5. PDRB per kapita → Kota Tegal, Kabupaten Cilacap
6. Share Sektor Industri Pengolahan → Kota Tegal, Kabupaten Banyumas
7. Purchasing power parity (PPP) → Kota Tegal, Kabupaten Banyumas
8. Share Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB ADHB → Kota Tegal, Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kota SBH yang dapat menjadi acuan bagi Kota Magelang adalah Kota Tegal. Dengan menggunakan metode *time trend* diproyeksi bahwa inflasi Kota Magelang sebesar 2,54 persen dengan *bond of error on estimation* sebesar 0,31. Sehingga inflasi Kota Magelang diproyeksi akan berada disekitar nilai 2,23 persen hingga 2,85 persen. Hasil proyeksi inflasi Indonesia dari Bank Indonesia tahun 2020 sebelum adanya pandemi Covid-19 sebesar 3 persen dengan *bond of error on estimation* sebesar 1 persen. Jika kondisi ini berlaku sama di seluruh Indonesia, maka rentang nilai inflasi Kota Magelang akan berada pada rentang nilai 1,84 hingga 3,84 persen pada tahun 2020.



Kompleks Pasar Rejowinangun Kota Magelang

# 5. KESIMPULAN & REKOMENDASI

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

### 5.1. Kesimpulan

Nilai inflasi yang baik adalah nilai yang terkendali (tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah dan stabil). Nilai inflasi yang terlalu tinggi cenderung tidak disukai oleh konsumen. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik bagi perekonomian dan cenderung tidak disukai oleh produsen karena kurang ada insentif untuk menciptakan inovasi produk.

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *time trend*, *specific seasonal index*, *deflator* PDRB, dan Tipologi Klassen dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, nilai inflasi Kota Magelang cenderung terkendali di kisaran 1 hingga 3 persen. Ringkasan hasil estimasi inflasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1** Perbandingan Nilai Inflasi Kota Magelang dengan Berbagai Model dalam Kondisi Normal (Tanpa Covid-19)

Keterangan	Time Trend	Specific Seasonal Index	Deflator PDRB	Tipologi Klassen
Nilai	2,05	2,80	1,25	2,54
Estimasi <i>error</i>	± 1,14	± 1,56	± 0,37	± 0,31
Rentang proyeksi	0,91–3,19	1,24–4,36	0,89–1,61	2,23–2,85

Sumber: Hasil analisis Tim Peneliti, 2020

Setiap model menghasilkan angka yang berbeda, karena asumsi yang digunakan masing-masing model juga berbeda. Nilai estimasi inflasi yang paling baik adalah yang memiliki *error* paling kecil. Dengan demikian, pendekatan Tipologi Klassen merupakan pendekatan yang perlu mendapat pertimbangan dari Kota Magelang. Kota yang dijadikan acuan (*benchmark city*) dalam pendekatan Tipologi Klassen adalah Kota Tegal, karena kota tersebut memiliki karakteristik makro ekonomi yang mirip dengan Kota Magelang.

Berbagai pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan *univariat* sehingga untuk meminimalkan *error* dari estimasi maka tim peneliti menyarankan untuk menggunakan estimasi *multivariate*. Pendekatan *multivariate* membutuhkan data mikro yang terupdate dengan salah satu variabel independennya adalah harga komoditi barang. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan pada riset ini karena terkendala dengan pandemi Covid-19.

## 5.2. Rekomendasi

Dari hasil kajian ini dapat dirumuskan beberapa rekomendasi berikut:

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang perlu meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan Kepolisian Resor Kota Magelang terkait pemantauan harga-harga di tingkat produsen maupun konsumen.
2. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Magelang perlu menjamin penambahan kasus positif Covid-19 terkendali, karena bila kasus Covid-19 terkendali, maka dampak terhadap perekonomian Kota Magelang tidak semakin parah. Hal ini menjadi salah satu prasyarat tercapainya angka proyeksi inflasi, atau setidaknya mendekati capaian angka tersebut.



Peninjauan protokol kesehatan oleh Sekda dan Gugus Covid-19 Kota Magelang

# DAFTAR PUSTAKA

## ANALISIS PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020), Konkordansi Klasifikasi IHK dan COICOP 2018. <https://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2020). Pengenalan Inflasi, <https://www.bi.go.id/>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2020a). *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 Provinsi Jawa Tengah 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2020b). *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Jawa Tengah 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Djalante, R., et al. (2020). "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020." *Progress in Disaster Science*, 6: 100091, <https://dx.doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Mankiw, N. G. (2011). *Principles of Economics, Sixth Edition*. South-Western Cengage Learning.
- Suseno dan Astiyah, S. (2009). Inflasi. Seri Kebangsentralan No. 22. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ye, Z. W., Yuan, S., Yuen, K. S., Fung, S. Y., Chan, C. P., dan D. Y. Jin. (2020). "Zoonotic origins of human coronaviruses." *International Journal of Biological Science*, 16(10): 1686-1697.
- Zhu, N., et al. (2020). "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019." *The New England Journal of Medicine*, 382: 727-733.

# DOKUMENTASI



1

... Rapat koordinasi antara UGM, TPID dan Tim Teknis dilaksanakan intens secara daring untuk menampung masukan dan reviu atas *progress* hasil penelitian ...



2

... Ekspos hasil penelitian dilakukan pada 27 November 2020 dengan menghadirkan BPS, TPID, Bappeda, Paguyuban Pedagang Pasar dan Balitbang ...



**DENGAN DATA**

**F A K T A  
BERBICARA  
LEBIH NYATA**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2

Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126

Portal <http://diskominsta.magelangkota.go.id>

Surel [diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)